



PERATORAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 66 TAHUN 2011

TENTANG
STANDAR KEBUTUHAN JABATAN PEKERJAAN DAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR KEBUTUHAN JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KEBUTUHAN JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang bertanggung jawab kepada Bupati Musi Rawas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
5. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
7. Kebutuhan adalah sejumlah pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan dan/atau menyelesaikan pekerjaan.

Pasal 2

Kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional pegawai negeri sipil ini dimaksudkan sebagai pedoman jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional pada perangkat daerah.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi setiap perangkat daerah untuk:
 - a. Penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil;
 - b. Pengusulan penambahan formasi/pengadaan;
 - c. Proses pemindahan dan penempatan;
- (2) Daftar kebutuhan Jabatan Pelaksana dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Daftar kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan pengurangan dan/atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Pengurangan dan/atau penambahan kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh kepala perangkat daerah kepada Bupati Musi Rawas melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dan/atau fungsional tertentu;
 - b. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari jabatan yang diusulkan;

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 20 November 2017

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 20 November 2017.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR⁶⁶

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 66 TAHUN 2017
 TENTANG : KEBUTUHAN JABATAN PELAKSANA
 DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	KEBUTUHAN JABATAN PELAKSANA	KET.
1	SEKRETARIAT DAERAH		
2	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	3	
3	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	3	
4	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	3	
5	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3	
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		
	SUBBAG PEMERINTAHAN UMUM	5	
	SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	5	
	SUB BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	5	
	BAGIAN HUKUM		
	SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	
	SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	5	
	SUB BAGIAN FASILITASI DAN BANTUAN HUKUM	5	
	BAGIAN ORGANISASI		
	SUB BAGIAN KELEMBAGAAN	5	
	SUB BAGIAN TATA LAKSANA	5	
	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ANALISA JABATAN	5	
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	SUB BAGIAN BINA SOSIAL KEMASYARAKATAN	6	
	SUB BAGIAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	6	
	SUB BAGIAN KEAGAMAAN	6	
6	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
	BAGIAN EKONOMI		
	SUB BAGIAN SARANA PEREKONOMIAN	6	
	SUB BAGIAN PRODUKSI DAERAH	6	
	SUB BAGIAN PERMODALAN DAN PERBANKAN	6	
	BAGIAN PEMBANGUNAN		
	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	7	
	SUB BAGIAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	6	
	SUB BAGIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN	6	
	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT		
	SUB BAGIAN PEMBERITAAN DAN KERJASAMA PERS	5	
	SUB BAGIAN PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI	5	
	SUB BAGIAN PUBLISEKSI DAN DOKUMENTASI	6	
7	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN		
	BAGIAN KEUANGAN		
	SUB BAGIAN ANGGARAN	6	
	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	7	
	SUB BAGIAN PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	6	
	BAGIAN UMUM		
	SUB BAGIAN TATA USAHA	3	
	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	6	
	SUB BAGIAN KEARSIPAN	6	
	BAGIAN PROTOKOL		
	SUB BAGIAN PENATALAKSANA ACARA	6	
	SUB BAGIAN ADMINISTRASI PIMPINAN	6	
	SUB BAGIAN PERJALANAN PIMPINAN	6	
	BAGIAN PERLENGKAPAN		
	SUB BAGIAN ANALISA KEBUTUHAN	6	
	SUB BAGIAN PENGADAAN	6	
	SUB BAGIAN INVENTARISASI DAN PEMELIHARAAN	7	

8	SEKRETARIAT DPRD	
	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	6
	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	6
	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	6
	BAGIAN KEUANGAN	
	SUB BAGIAN ANGGARAN DAN PROGRAM	4
	SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN	6
	SUB BAGIAN PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	6
	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	6
	SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6
	SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	6
9	INSPEKTORAT	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	7
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	7
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	7
	INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN BID. INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP	2
	INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN BID. PEREKONOMIAN	2
	INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN BID. SOSIAL BUDAYA DAN KESRA	2
	INSPEKTUR PEMBANTU PENGAWASAN BID. KHUSUS DAN PENGADUAN MASYARAKAT	2
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEJANGAN	6
	BIDANG EKONOMI DAN SDA	
	SUB BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	2
	SUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PASAR DAN UMKM	2
	SUB BIDANG INVESTASI, KEUANGAN DAN SDA	2
	BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMBANGUNAN SDM	
	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA	2
	SUB BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	2
	SUB BIDANG KEPENDUDUKAN, KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAHAN UMUM	2
	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	
	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG	2
	SUB BIDANG SARANA PRASARANA	2
	SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH, PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2
	BIDANG PROGRAM, DATA DAN EVALUASI	
	SUB BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2
	SUB BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH	2
	SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI	2
11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	6
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5
	BIDANG ANGGARAN	
	SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG	3
	SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG	3
	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	3
	BIDANG PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	
	SUB BIDANG VERIFIKASI	3
	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS	3
	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN	3
	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	
	SUB BIDANG PEMBUKUAN PENDAPATAN DAERAH	3
	SUB BIDANG PEMBUKUAN BELANJA DAERAH	3
	SUB BIDANG PELAPORAN	3

	BIDANG ASET DAERAH		
	SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN		3
	SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PENATAUSAHAAN ASET		3
	SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN		3
12	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI		3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET		6
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		5
	BIDANG PAJAK PENDATAAN, PENETAPAN PAJAK, DAN RETRIBUSI		
	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN		2
	SUB BIDANG PENETAPAN DAN PELAYANAN		2
	SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI		2
	BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN		
	SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PENERIMAAN		2
	SUB BIDANG PEMBUKUAN BENDA BERHARGA		2
	SUB BIDANG PELAPORAN		2
	BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN		
	SUB BIDANG PENAGIHAN		2
	SUB BIDANG KEBERATAN DAN PENGURANGAN		2
	SUB BIDANG PEMERIKSAAN		2
	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN		
	SUB BIDANG PENGENDALIAN		2
	SUB BIDANG INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN		2
	SUB BIDANG EVALUASI		2
	UPT PP WIL. TUGUMULYO		2
	SUB BAGIAN UPT PP WIL. TUGUMULYO		2
	UPT PP WIL. SELANGIT		2
	SUB BAGIAN UPT PP WIL. SELANGIT		2
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		7
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET		5
	BIDANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN		
	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGANGKATAN PEGAWAI		3
	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PENSUN PEGAWAI		3
	SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI		3
	BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN		
	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN		6
	SUB BIDANG KEPANGKATAN		4
	SUB BIDANG INFORMASI DAN DATA PEGAWAI		6
	BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI		5
	SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL		3
	SUB BIDANG DIKLAT STRUKTURAL		4
14	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		4
	SUB BAGIAN KEUANGAN		6
	BIDANG DATA INFORMASI DAN KERJASAMA		
	SUB BIDANG KERJASAMA		2
	SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI		2
	SUB BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN		2
	BIDANG PENELITIAN		
	SUB BIDANG PENELITIAN BIDANG EKONOMI		2
	SUB BIDANG PENELITIAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA		2
	SUB BIDANG PENELITIAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN WILAYAH		2
	BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI		
	SUB BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BIDANG EKONOMI		2
	SUB BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA		2

	SUB BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN WILAYAH	2	
15	DINAS PENDIDIKAN		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASSET	9	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	6	
	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL		
	SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	4	
	SEKSI KELEMBAGAAN & SARANA PRASARANA PAUD & PENDIDIKAN NON FORMAL	4	
	SEKSI PESERTA DIDIK & PEMBANG. KARAKTER PAUD & PENDIDIKAN NON FORMAL	4	
	BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR		
	SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PENDIDIKAN DASAR	4	
	SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR	4	
	SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PENDIDIKAN DASAR	4	
	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN		
	SEKSI PTK PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	4	
	SEKSI PTK SD	4	
	SEKSI PTK SMP	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. TUGUMULYO	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. TUGUMULYO	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. PURWODADI	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. PURWODADI	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. SUMBERHARTA	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. SUMBERHARTA	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. STL ULU TERAWAS	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. STL ULU TERAWAS	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. SELANGIT	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. SELANGIT	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. MEGANG SAKTI	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. MEGANG SAKTI	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. MUARA LAKITAN	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. MUARA LAKITAN	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. MUARA KELINGI	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. MUARA KELINGI	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. TUAH NEGERI	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. TUAH NEGERI	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. MUARA BELITI	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. MUARA BELITI	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. TP. KEPUNGUT	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. TP. KEPUNGUT	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. SUKAKARYA	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. SUKAKARYA	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. JAYALOKA	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. JAYALOKA	4	
	UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. BTS ULU	8	
	SUB BAGIAN UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. BTS ULU	4	
	SEKOLAH		
	SLTP	4	Setiap Sekolah
	SD	2	
16	DINAS KESEHATAN		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3	
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	6	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5	
	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT		
	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	3	
	SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3	
	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA	3	
	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		
	SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	3	
	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	3	

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	3
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	3
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	3
SEKSI PENINGKATAN MUTU, AKREDITASI, DAN JAMINAN KESEHATAN	3
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
SEKSI KEFARMASIAN	3
SEKSI FASILITAS PELAYANAN DAN ALAT KESEHATAN	3
SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3
UPT PUSKESMAS L. SIDOHARJO KEC. TUGUMULYO	8
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS L SIDO HARJO	4
UPT PUSKESMAS C. NAWANGSASI KEC. TUGUMULYO	8
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS C NAWANGSASI	4
UPT PUSKESMAS O. MANGUNHARJO KEC. PURWODADI	6
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS O. MANGUNHARJO KEC. PURWODADI	3
UPT PUSKEMAS STL ULU TERAWAS	6
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS TERAWAS KEC. STL ULU TERAWAS	3
UPT PUSKESMAS CIPTODADI KEC. SUKAKARYA	4
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS CIPTODADI	2
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	8
SUB BAGIAN TU UPT LABORATORIUM	4
UPT PUSKESMAS CECAR KEC. BTS ULU	6
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS CECAR	3
UPT PUSKESMAS KARYA SAKTI KEC, MUARA KELINGI	8
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS KARYA SAKTI	4
UPT PUSKESMAS MEGANG SAKTI KEC, MEGANG SAKTI	8
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS MEGANG SAKTI KEC. MEGANG SAKTI	8
UPT PUSKESMAS MUARA KELINGI	4
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS MUARA KELINGI	2
UPT PUSKESMAS AIR BELITI TUAH NEGERI	3
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS AIR BELITI KEC. TUAH NEGERI	2
UPT PUSKESMAS KELINGI IV/C KEC. MEGANG SAKTI	3
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS KELINGI IVC	2
UPT PUSKESMAS PIAN RAYA KEC. MUARA LAKITAN	6
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS PIAN RAYA KEC. MUARA LAKITAN	2
UPT PUSKESMAS NGESTIBOGA KEC. JAYALOKA	4
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS NGESTIBOGA KEC. JAYA LOKA	2
UPT PUSKESMAS SUMBER HARTA KEC. SUMBER HARTA	6
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS SUMBER HARTA	4
UPT PUSKESMAS MUARA KATI KEC. TPK	3
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS MUARA KATI	1
UPT PUSKESMAS SUNGAI BUNUT KEC. BTS ULU	3
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS SUNGAI BUNUT	1
UPT PUSKESMAS SELANGIT KEC. SELANGIT	6
SUB BAGIAN TU UPT PUSKEMAS SELANGIT	4
UPT PUSKESMAS MUARA BELITI KEC. MUARA BELITI	8
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS MUARA BELITI KEC. MUARA BELITI	3
UPT PUSKESMAS MUARA LAKITAN	6
SUB BAGIAN TU UPT PUSKESMAS MUARA LAKITAN	4
17 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
SEKRETARIAT	
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	6
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	6
BIDANG PEMBANGUNAN	
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN	3
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN	3
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN	3
BIDANG PEMELIHARAAN	
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN	3

	SEKSI PEMELIHARAAN JEMBATAN	3
	SEKSI REHABILITASI JALAN	3
	BIDANG BINA TEKNIK	
	SEKSI PERENCANAAN TEKNIK	3
	SEKSI SURVEI LEGER JALAN DAN JEMBATAN	3
	SEKSI PENYIAPAN DOKUMEN TEKNIK	3
	BIDANG PENGUJIAN DAN PERALATAN	
	SEKSI PERALATAN DAN PERBEKALAN	3
	SEKSI PENGUJIAN TEKNIK	3
	SEKSI TATA TEKNIK DAN INVENTARISASI	3
	UPT WILAYAH I	4
	SUB BAGIAN TU UPT WILAYAH I	2
	UPT WIL II	4
	SUB BAGIAN TU UPT WILAYAH II	2
	UPT WILAYAH III	4
	SUB BAGIAN TU UPT WILAYAH III	2
18	DINAS PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan ✓	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	7
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5
	BIDANG PERTAMANAN, KEBERSIHAN, DAN KELISTRIKAN	
	SEKSI PERTAMANAN	4
	SEKSI KEBERSIHAN	4
	SEKSI KELISTRIKAN	4
	BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	
	SEKSI TATA RUANG	4
	SEKSI BANGUNAN	4
	SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN	4
	BIDANG PENGAIRAN	
	SEKSI PENGELOLAAN IRIGASI	4
	SEKSI PENGELOLAAN SUNGAI	4
	SEKSI OPERASIONAL PEMELIHARAAN DAN BINA MANFAAT	4
	BIDANG BINA TEKNIS	
	SEKSI BINA TEKNIS	4
	SEKSI PENGAWASAN	4
	SEKSI PENGENDALIAN	4
	UPT DAERAH IRIGASI AIR LAKITAN	25
	SUB BAGIAN TU UPT DI AIR LAKITAN	2
	UPT SPAM	-
	SUB BAGIAN TU UPT SPAM	2
	SEKSI TEKNIS UPT SPAM	6
	SUB BAGIAN KEUANGAN UPT SPAM	3
19	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN ASET	5
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	6
	BIDANG PERUMAHAN	
	SEKSI RUMAH SWADAYA DAN RUMAH KHUSUS	3
	SEKSI RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL	3
	SEKSI PEMBIAYAAN & PENGEMBANGAN PENATAAN PERUM KAWASAN PEMUKIMAN	3
	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DAN TATA RUANG KAWASAN	
	SEKSI KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENANGANAN KUMUH	3
	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG KAWASAN	3
	SEKSI TATA GUNA TANAH, LAHAN DAN HUNIAN BERIMBANG	3
	BIDANG PERTANAHAN	
	SEKSI PERMASALAHAN TANAH	3
	SEKSI INVENTARISASI TANAH	3
	SEKSI PENGADAAN TANAH	3

20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	6
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5
	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	
	SEKSI OPERASI PENGENDALIAN	4
	SEKSI KETERTIBAN UMUM	4
	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	
	SEKSI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	4
	SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	4
	BIDANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
	SEKSI DATA DAN INFORMASI	4
	SEKSI PELATIHAN DAN MOBILISASI	4
	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	
	SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN	4
	SEKSI PEMADAM KEBAKARAN	50
21	DINAS SOSIAL	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET	6
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	6
	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	3
	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	2
	SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA	2
	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	
	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	2
	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	2
	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	2
	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	SEKSI PEMBERDAYAAN PERORANGAN, KELUARGA & KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	2
	SEKSI PEMBER. SOSIAL KELEM. MASY.& PENERTIBAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN	3
	SEKSI KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	2
	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	
	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS	2
	SEKSI PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN	2
	SEKSI BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN	2
	UPT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA	5
	SUBBAG PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA	1
	UPT PANTI ASUHAN BUDI MULIA	5
	SUBBAG PANTI ASUHAN BUDI MULIA	1
	UPT PANTI JOMPO TRESNA WERDA	5
	SUB BAGIAN TU PANTI JOMPO TRESNA WERDA	1
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	7
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	7
	BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	2
	SEKSI PEMBINAAN INSTRUKTUR DAN SERTIFIKASI	2
	SEKSI BIMBINGAN DAN PRODUKTIVITAS	2
	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
	SEKSI INFORMASI PASAR KERJA	2
	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	2
	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	2
	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT KERJA, DAN JAMINAN SOSIAL	
	SEKSI PERSYARATAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	2
	SEKSI PENGUPAHAN DAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	2

	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	2
	BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
	SEKSI PENYIAPAN KAWASAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI	2
	SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SAPRAS KAWASAN TRANSMIGRASI	2
	SEKSI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA TRANSMIGRASI	2
	UPT LEMBAGA LATIHAN KERJA DAN UKM	4
	SUB BAGIAN TU UPT LEMBAGA LATIHAN KERJA DAN UKM	2
23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	5
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	4
	BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI	2
	SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG SOSIAL, POLITIK DAN HUKUM	2
	SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG KUALITAS KELUARGA	2
	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2
	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK	2
	SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK	2
24	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	6
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5
	BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN	
	SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	2
	SEKSI SUMBER DAYA PANGAN	2
	SEKSI KERAWANAN PANGAN	2
	BIDANG DISTRIBUSI PANGAN	
	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	2
	SEKSI HARGA PANGAN	2
	SEKSI CADANGAN PANGAN	2
	BIDANG KONSUMSI PANGAN	
	SEKSI KONSUMSI PANGAN	2
	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	2
	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	2
	BIDANG KEAMANAN PANGAN	
	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	2
	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2
	SEKSI KERJA SAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	2
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	6
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5
	BIDANG TATA LINGKUNGAN	
	SEKSI INVENTARISASI, RPPLH DAN KLHS	2
	SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	2
	SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2
	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	
	SEKSI PENGURANGAN SAMPAH	2
	SEKSI PENANGANAN SAMPAH	2
	SEKSI LIMBAH B3	2
	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	SEKSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN	2
	SEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN	2
	SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN	2
	BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
	SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN	2
	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	2

	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	2
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET	5
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	3
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
	SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	2
	SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK	2
	SEKSI PENDATAAN PENDUDUK	2
	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
	SEKSI KELAHIRAN	6
	SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	2
	SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	2
	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
	SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2
	SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA	2
	SEKSI TATA KELOLA DAN SDM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	2
	BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	
	SEKSI KERJA SAMA	2
	SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	2
	SEKSI INOVASI PELAYANAN	2
27	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	6
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5
	BIDANG PEMERINTAHAN DESA/KEKELURAHAN	
	SEKSI PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA	2
	SEKSI PENGEMBANGAN, PEMBINAAN SDM APARATUR DESA	2
	SEKSI KERJA SAMA PEMERINTAH DESA DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA	2
	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	
	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI KEUANGAN DESA	2
	SEKSI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	2
	SEKSI PEMBINAAN DAN PENATAAN ASET DESA	2
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI DESA	
	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2
	SEKSI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA	2
	SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN ORGANISASI MASYARAKAT DESA	2
	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN DAN INOVASI DESA	
	SEKSI PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN DESA	2
	SEKSI PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI DAN INOVASI PERDESAAN	2
	SEKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	2
28	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	7
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5
	BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	
	SEKSI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUSEKSI (KIE)	2
	SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN	2
	SEKSI PENDAYAGUNAAN PKB/PLKB DAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	2
	BIDANG KELUARGA BERENCANA	
	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT KONTRASEPSI	2
	SEKSI JAMINAN PELAYANAN KB	2
	SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESERTAAN KB	2
	BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	
	SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA	2
	SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA BALITA, ANAK DAN LANSIA	2
	SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA	2

	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK	
	SEKSI PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2
	SEKSI PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2
	SEKSI DATA DAN INFORMASI	2
	UPTD KB KEC. MUARA BELITI	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. MUARA BELITI	1
	UPTD KB KEC. TUAH NEGERI	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. TUAH NEGERI	1
	UPTD KB KEC. TP. KEPUNGUT	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. TP. KEPUNGUT	1
	UPTD KB KEC. SUKAKARYA	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. SUKAKARYA	1
	UPTD KB KEC. JAYALOKA	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. JAYALOKA	1
	UPTD KB KEC. MUARA KELINGI	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. MUARA KELINGI	1
	UPTD KB KEC. MUARA LAKITAN	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. MUARA LAKITAN	1
	UPTD KB KEC. TUGUMULYO	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. TUGUMULYO	1
	UPTD KB KEC. PURWODADI	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. PURWODADI	1
	UPTD KB KEC. STL ULU TERAWAS	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. STL ULU TERAWAS	1
	UPTD KB KEC. SELANGIT	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. SELANGIT	1
	UPTD KB KEC. MEGANG SAKTI	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. MEGANG SAKTI	1
	UPTD KB KEC. SUMBER HARTA	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. SUMBER HARTA	1
	UPTD KB KEC. BTS ULU	2
	SUB BAGIAN TU UPTD KB KEC. BTS ULU	1
29	DINAS PERHUBUNGAN	
	SEKRETARIAT	
	SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN ASET	6
	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	4
	BIDANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DARAT	
	SEKSI LALU LINTAS DARAT	3
	SEKSI PEMBINAAN KESELAMATAN LALU LINTAS DARAT	3
	SEKSI PERLINDUNGAN PENGENDALIAN OPERASIONAL	3
	BIDANG ANGKUTAN DARAT	
	SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN BARANG	3
	SEKSI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN	3
	SEKSI KEMITRAAN DAN PENYULUHAN ANGKUTAN	3
	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	6
	SUB BAGIAN TU UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	2
	UPT TERMINAL	15
	SUB BAGIAN TU UPT TERMINAL	6
	UPT PARKIR	3
	SUB BAGIAN TU UPT PARKIR	2
30	DINAS KOMUNISEKSI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	6
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5
	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNISEKSI PUBLIK	
	SEKSI LAYANAN KOMUNISEKSI PUBLIK	3
	SEKSI PENGELOLAAN KELOMPOK KOMUNISEKSI PUBLIK	4
	SEKSI KEMITRAAN KOMUNISEKSI PUBLIK	3

	BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNISEKSI (TIK)	
	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	3
	SEKSI PENGENDALIAN, PENGAWASAN INFRASTRUKTUR TEKN. INFORMASI & KOMUNISEKSI	4
	SEKSI INTEGRASI SISTEM INFORMASI DAN DATABASE	4
	BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT	
	SEKSI PENGEMBANGAN APLISEKSI	3
	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	4
	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	3
	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK	3
	SEKSI PERSANDIAN	4
	SEKSI KEAMANAN DATA DAN INFORMASI	4
31	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	2
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	5
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	4
	BIDANG KELEMBAGAAN	
	SEKSI BADAN HUKUM DAN ORGANISASI KOPERASI	2
	SEKSI TATA LAKSANA KOPERASI	2
	SEKSI KEANGGOTAAN DAN PENYULUHAN	2
	BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	
	SEKSI PENGAWASAN KEPATUHAN DAN KELEMBAGAAN	2
	SEKSI PENGAWASAN USAHA & PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI	2
	SEKSI PENANGANAN KASUS PERKOPERASIAN	2
	BIDANG PRODUKSI DAN PEMBIAYAAN	
	SEKSI PRODUKSI	2
	SEKSI PEMBIAYAAN KOPERASI	2
	SEKSI PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)	2
	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	
	SEKSI FASILITASI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)	2
	SEKSI PENGEMBANGAN USAHA & PEMASARAN USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH	2
	SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)	2
32	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN ASET	6
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5
	BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAERAH	
	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH	2
	SEKSI PELAYANAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAERAH	2
	SEKSI DEREGULASI PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2
	BIDANG PROMOSI DAN KERJA SAMA	
	SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL	2
	SEKSI KERJASAMA PENANAMAN MODAL	2
	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI	2
	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	
	SEKSI PENDATAAN DAN PELAPORAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	2
	SEKSI PENERIMAAN DAN PENELITIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	2
	SEKSI PENETAPAN DAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	2
	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	
	SEKSI MONITORING DAN PENGAWASAN	2
	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN	2
	SEKSI PENGADUAN DAN PENYULUHAN	2
33	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	5
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	4
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA	
	SEKSI TENAGA DAN SUMBER DAYA PEMUDA, IPTEK DAN IMTAQ PEMUDA	2

	SEKSI PENINGKATAN WAWASAN DAN KAPASITAS PEMUDA	2	
	SEKSI PENINGKATAN KREATIVITAS PEMUDA	2	
	BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA		
	SEKSI KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN, KEMITRAAN, DAN PENGHARGAAN PEMUDA	2	
	SEKSI ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN	2	
	SEKSI KEWIRAUSAHAAN DAN INFRASTRUKTUR PEMUDA	2	
	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA		
	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN SENTRA OLAHRAGA	2	
	SEKSI OLAHRAGA REKREASI, TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS	2	
	SEKSI KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN OLAHRAGA	2	
	BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA		
	SEKSI PEMBIBITAN, IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN	2	
	SEKSI PROMOSI OLAHRAGA DAN OLAHRAGA PRESTASI	2	
	SEKSI STANDARISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA	2	
34	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3	
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	5	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	4	
	BIDANG KEBUDAYAAN		
	SEKSI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA	2	
	SEKSI SEJARAH NILAI TRADISIONAL (JARAHNITRA) MUSEUM & KEPURBAKALAN (MUSKAL)	2	
	SEKSI KESENIAN	2	
	BIDANG OBJEK WISATA		
	SEKSI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA	2	
	SEKSI PEMBINAAN OBJEK WISATA	2	
	SEKSI REKREASI DAN ANEKA HIBURAN	2	
	BIDANG SARANA PARIWISATA		
	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PARIWISATA	2	
	SEKSI PEMBINAAN SARANA PARIWISATA	2	
	SEKSI DATA DAN INFORMASI PARIWISATA	2	
	BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN		
	SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN	2	
	SEKSI KERJA SAMA WISATA	2	
	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA	2	
35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN ASET	5	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	3	
	BIDANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN		
	SEKSI REFERENSI PERPUSTAKAAN	2	
	SEKSI KLASIFIKASI PERPUSTAKAAN	2	
	SEKSI SIRKULASI PERPUSTAKAAN	2	
	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
	SEKSI PENGEMBANGAN MINAT BACA	2	
	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2	
	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN	2	
	BIDANG KEARSIPAN		
	SEKSI PENGELOLAAN ARSIP	2	
	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	2	
	SEKSI SISTEM INFORMASI ARSIP	2	
36	DINAS PERIKANAN		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3	
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	6	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5	
	BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL		
	SEKSI DIKLAT DAN PENDAMPINGAN NELAYAN KECIL	2	
	SEKSI KEMITRAAN, IPTEK DAN INFORMASI NELAYAN KECIL	2	
	SEKSI KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	2	

	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PEMBUDIDAYA IKAN	
	SEKSI DIKLAT DAN PENDAMPINGAN USAHA KECIL PEMBUDIDAYA IKAN	2
	SEKSI KEMITRAAN, IPTEK DAN INFORMASI USAHA KECIL PEMBUDIDAYA IKAN	2
	SEKSI KELEMBAGAAN USAHA KECIL PEMBUDIDAYA IKAN	2
	BIDANG PERIZINAN DAN TEMPAT PELELANGAN IKAN	
	SEKSI PENERBITAN SIU PERIKANAN PEMBUDIDAYA IKAN	2
	SEKSI PENERBITAN TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYA IKAN	2
	SEKSI TEMPAT PELELANGAN IKAN	2
	BIDANG PENGELOLAAN IKAN	
	SEKSI KAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	2
	SEKSI PENGELOLAAN AIR DAN LAHAN	2
	SEKSI PERBENIHAN, PEMBINAAN CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK DAN CARA PEMBENIH	2
	UPT BALAI BENIH IKAN (BBI) WILAYAH I (A. WIDDODO)	3
	SUB BAGIAN TU BALAI BENIH IKAN (BBI) WIL. I (A. WIDDODO)	1
	PASAR BENIH IKAN (PBI)	3
	SUB BAGIAN TU PASAR BENIH IKAN (PBI)	1
	UPT BALAI BENIH IKAN (BBI) WILAYAH II (U1. PAGAR SARI)	3
	SUB BAGIAN TU BALAI BENIH IKAN (BBI) II (U1. PAGAR SARI)	1
	POS KESEHATAN IKAN TERPADU (POSIKANDU)	3
37	DINAS PERKEBUNAN	
	SEKRETARIAT	
	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	6
	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5
	BIDANG PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN	
	SEKSI PERBENIHAN	3
	SEKSI TANAMAN TAHUNAN DAN SEMUSIM	3
	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN	3
	BIDANG FRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN	
	SEKSI LAHAN DAN AIR	3
	SEKSI PUPUK PESTISIDA DAN ALSINTAN	3
	SEKSI PENYULUHAN	3
	BIDANG PENGOLAHAN PEMASARAN DAN USAHA PERKEBUNAN	
	SEKSI BIMBINGAN USAHA	3
	SEKSI PENGOLAHAN PEMASARAN	3
	SEKSI USAHA PERKEBUNAN DAN INVESTASI	3
	BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
	SEKSI DATA STATISTIK DAN INFORMASI PERKEBUNAN	3
	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	3
	SEKSI ANALISIS DAN PELAPORAN	3
	UPT BP2MB	3
	SUB BAGIAN TU UPT BP2MB	3
38	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	4
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	7
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	7
	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	
	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	2
	SEKSI PUPUK, PESTISIDA ALAT DAN MESIN	2
	SEKSI PENYULUHAN	2
	BIDANG TANAMAN PANGAN	
	SEKSI DATA DAN STATISTIK	2
	SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PRODUKSI	3
	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	2
	BIDANG HORTIKULTURA	
	SEKSI DATA DAN STATISTIK	2
	SEKSI PENERAPAN TEKNOLOGI DAN PRODUKSI	2
	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	2
	BIDANG PETERNAKAN DAN KESWAN	

	SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI	3
	SEKSI KESEHATAN HEWAN	3
	SEKSI KESEHATAN MASY. VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	3
	UPT TPH KEC. MUARA BELITI	2
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. MUARA BELITI	1
	UPT TPH KEC. JAYALOKA	2
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. JAYALOKA	1
	UPT TPH KEC. SUKAKARYA	2
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. SUKAKARYA	1
	UPT TPH KEC. SUMBERHARTA	2
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. SUMBERHARTA	1
	UPT TPH KEC. TUGUMULYO	2
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. TUGUMULYO	1
	UPT TPH KEC. PURWODADI	2
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. PURWODADI	1
	UPT TPH KEC. MEGANG SAKTI	2
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. MEGANG SAKTI	1
	UPT TPH KEC. STL ULU TERAWAS	2
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. STL ULU TERAWAS	1
	UPT TPH KEC. SELANGIT	2
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. SELANGIT	1
	UPT TPH KEC. MUARA LAKITAN	2
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. MUARA LAKITAN	1
	UPT TPH KEC. MUARA KELINGI	2
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. MUARA KELINGI	1
	UPT TPH KEC. BTS ULU	2
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. BTS ULU	1
	UPT TPH KEC. TPK	1
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. TPK	1
	UPT TPH KEC. TUAH NEGERI	1
	SUB BAGIAN TU UPT TPH KEC. TUAH NEGERI	1
	UPT DIKLAT PERTANIAN	2
	SUB BAGIAN TU UPT DIKLAT PERTANIAN	2
	UPT PERBENIHAN	2
	SUB BAGIAN TU SUB BAGIAN TU UPT PERBENIHAN	1
	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN	2
	SUB BAGIAN TU SUB BAGIAN TU UPT PERLINDUNGAN TANAMAN	2
	UPTD RPH DAN RPA	3
	UPTD PASAR HEWAN	3
	UPT SP3	5
	UPTD KESWAN MEGANG SAKTI	10
	UPTD KESWAN TUGUMULYO	10
	UPTD KESWAN PURWODADI	10
	UPTD KESWAN SIMPANG SEMAMBANG	10
	UPTD KESWAN MUARA LAKITAN	10
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	3
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	6
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5
	BIDANG PERDAGANGAN	
	SEKSI BINA USAHA	2
	SEKSI DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2
	SEKSI PENGAWASAN TERTIB NIAGA DAN METROLOGI	2
	BIDANG PERINDUSTRIAN	
	SEKSI BIMBINGAN USAHA INDUSTRI	2
	SEKSI PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI	2
	SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI	2
	BIDANG PENGELOLAAN PASAR	
	SEKSI PENDAPATAN	2

	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	2
	SEKSI PENGAWASAN PASAR	2
	BIDANG PROGRAM	
	SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM	2
	SEKSI DATA DAN INFORMASI	2
	SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	2
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	SEKRETARIAT BADAN KESBANGPOL	
	SUB BAGIAN TATA USAHA	4
	SUB BAGIAN KEUANGAN	5
	SUB BAGIAN PROGRAM	3
	BIDANG IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
	SUB BIDANG BINA IDOLOGI	2
	SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN	2
	BIDANG KETAHANAN EKONOMI SENI BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	
	SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA	2
	SUB BIDANG KETAHANAN AGAMA KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	2
	BIDANG POLITIK	
	SUB BIDANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENDIDIKAN POLITIK	2
	SUB BIDANG KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK	2
	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	
	SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN PENGAWASAN LEMBAGA ORANG ASING	2
	SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK	2
41	DIREKTUR RUMAH SAKIT dr. SOBIRIN	
	BAGIAN TATA USAHA	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	15
	SUB BAGIAN KEUANGAN	35
	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	23
	BIDANG PELAYANAN	
	SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	4
	SEKSI ANALISA DAN PENDAYAGUNAAN SARANA	4
	BIDANG KEPERAWATAN	
	SEKSI PROFESI SDM DAN ASUHAN KEPERAWATAN	4
	SEKSI BIDANG LOGISTIK	4
	BIDANG REKAM MEDIK DAN PERENCANAAN	
	SEKSI PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	4
	SEKSI REKAM MEDIK DAN PROMOSI KESEHATAN	4
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA	7
	SEKSI PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	3
	SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	3
	SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK	3
43	CAMAT TUGUMULYO	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	3
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2
	SEKSI PEMERINTAHAN	2
	SEKSI PELAYANAN UMUM	2
	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	2
	SEKSI KEMANANAN DAN KETERTIBAN	2
	SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	2
44	CAMAT PURWODADI	
	SEKRETARIAT	
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	3
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2
	SEKSI PEMERINTAHAN	2
	SEKSI PELAYANAN UMUM	2
	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	2
	SEKSI KEMANANAN DAN KETERTIBAN	2
	SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	2

45	CAMAT SUMBERHARTA		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	3	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2	
	SEKSI PEMERINTAHAN	2	
	SEKSI PELAYANAN UMUM	2	
	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	
	SEKSI KEMANANAN DAN KETERTIBAN	2	
	SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	2	
46	CAMAT STL ULU TERAWAS		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	3	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2	
	SEKSI PEMERINTAHAN	2	
	SEKSI PELAYANAN UMUM	2	
	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	
	SEKSI KEMANANAN DAN KETERTIBAN	2	
	SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	2	
47	CAMAT SELANGIT		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	3	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2	
	SEKSI PEMERINTAHAN	2	
	SEKSI PELAYANAN UMUM	2	
	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	
	SEKSI KEMANANAN DAN KETERTIBAN	2	
	SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	2	
48	CAMAT MEGANG SAKTI		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	3	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2	
	SEKSI PEMERINTAHAN	2	
	SEKSI PELAYANAN UMUM	2	
	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	
	SEKSI KEMANANAN DAN KETERTIBAN	2	
	SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	2	
49	CAMAT MUARA BELITI		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	3	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2	
	SEKSI PEMERINTAHAN	2	
	SEKSI PELAYANAN UMUM	2	
	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	
	SEKSI KEMANANAN DAN KETERTIBAN	2	
	SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	2	
50	CAMAT TUAH NEGERI		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	3	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2	
	SEKSI PEMERINTAHAN	2	
	SEKSI PELAYANAN UMUM	2	
	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	
	SEKSI KEMANANAN DAN KETERTIBAN	2	
	SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	2	
51	CAMAT MUARA KELINGI		
	SEKRETARIAT		
	SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	3	
	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2	
	SEKSI PEMERINTAHAN	2	
	SEKSI PELAYANAN UMUM	2	